



RANKIR RENJA KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2026

Jl. Pb Sudirman No.78 Kupang - 61352
Laman : jetis.mojokertokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jetis Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini merupakan bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Renja Kecamatan Jetis dilakukan sebagai penyesuaian terhadap dinamika pembangunan dan kebijakan strategis daerah yang mengalami perkembangan setelah dokumen Ranwal Renja disusun. Proses ini mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan nasional dan daerah, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Jetis pada Tahun 2026 agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, mulai dari tahap pengumpulan data, analisis hingga penyusunan akhir. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.



IRI CAHYO HARIANTO, S.Sos, MM
PEMBINA TK.I/IVb
NIP. 196810161990031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISIii

BAB I1

PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang1

1.2 Landasan Hukum3

1.3 Maksud dan Tujuan.....5

1.4 Sistematika Penulisan.....6

BAB II9

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH9

TAHUN LALU9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah15

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah17

2.4 Review Terhadap RKPD18

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....26

BAB III27

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....27

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....27

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah27

3.3 Program dan Kegiatan28

BAB IV31

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

4.1 Rencana Program dan Kegiatan Rencana Kerja PD Tahun 2026

4.2 Tangging Tematik

BAB V36

PENUTUP36

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan Renja36

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan36

5.3 Rencana Tindak Lanjut37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 Kecamatan Jetis merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, dan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Penyusunan RENJA sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai proyeksi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan RENSTRA 2025-2029 Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi Kabupaten Mojokerto di Kecamatan Jetis dalam rangka mencapai ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur”***. Visi Kabupaten Mojokerto inilah yang akan menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD. RPJMD sendiri adalah dokumen perencanaan daerah untuk Periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Renja Perangkat Daerah disusun melalui tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan Renja SKPD

Tahapan persiapan penyusunan Renja antara lain pembentukan tim penyusun Renja, orientasi mengenai Renja, penyusunan agenda kerja, serta pengumpulan data dan informasi.

b. Penyusunan Rancangan Renja SKPD

1. Tahap perumusan Renja

Perumusan Renja dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD, telaah terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD, pembahasan forum SKPD, serta penyesuaian dokumen Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap penyajian rancangan Renja

Penyajian Renja dapat disusun menurut sistematika yang ada.

c. Pelaksanaan forum SKPD

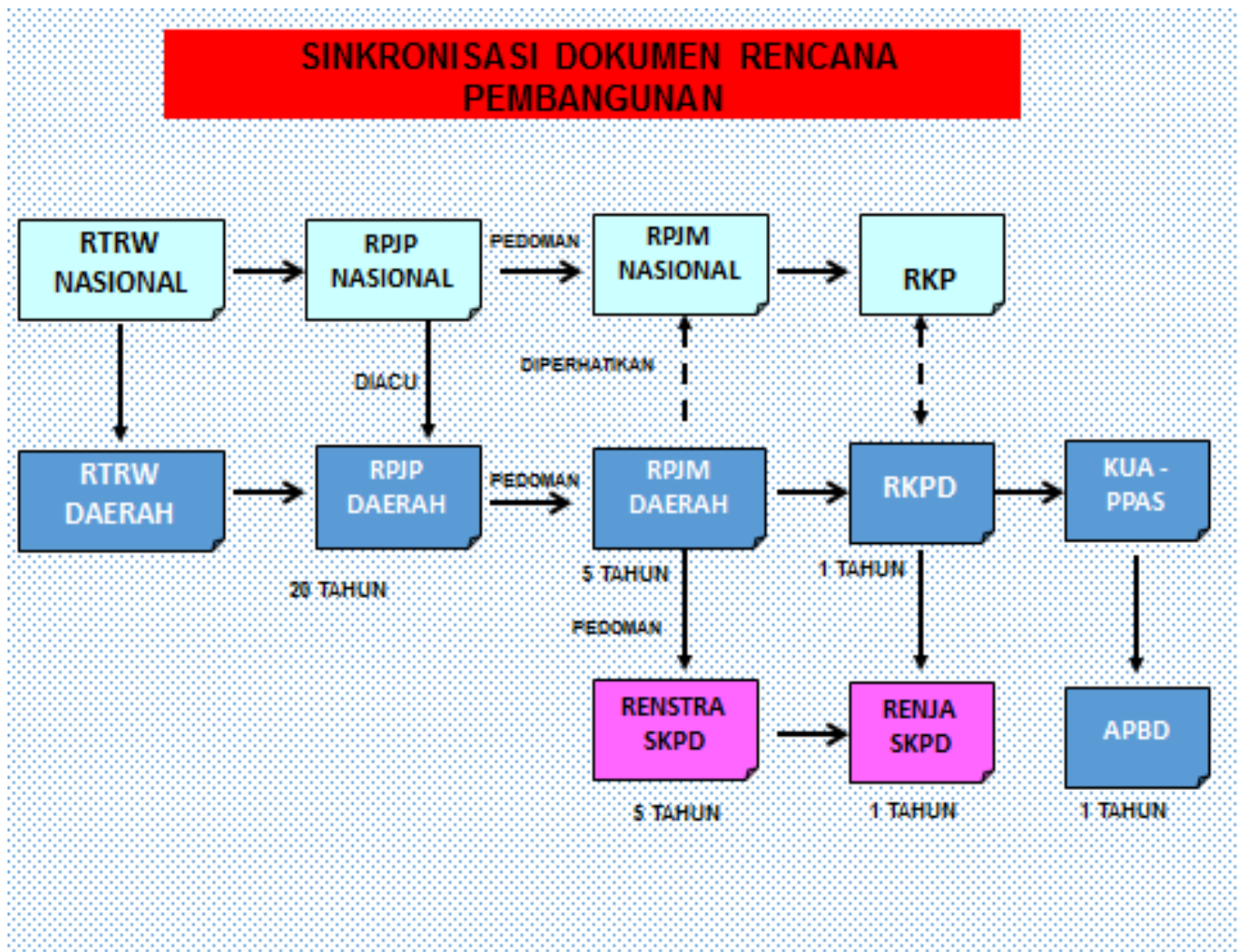
Forum SKPD merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja SKPD.

d. Penetapan Renja SKPD

Penetapan Renja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran tersebut.

Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, Renja K/L dan Renja Provinsi dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen
RKPD



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan JETIS yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan JETIS.

RKPD merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Kegiatan awal penyusunan Rancangan APBD dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Berdasarkan KUA yang telah disepakati maka Pemerintah Daerah menyusun PPAS dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. Menentukan urusan program untuk masing-masing urusan;
- c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Dari KUA dan PPAS yang telah disusun akan diperoleh nota kesepakatan yang akan menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) memuat tentang aktivitas dalam penyusunan APBD. RKA-SKPD ini dibuat oleh unit-unit kerja pemerintah sehingga sifatnya adalah usulan dengan menggunakan PPAS sebagai acuannya. Usulan-usulan ini akan dibahas dan dibuat penetapan oleh panitia anggaran yang dibentuk oleh Kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya dievaluasi dan diseleksi menjadi RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan JETIS Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang – undang Nomor 14 2028 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
- 14) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- 27) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 4)
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1)
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
- 31) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
- 32) Surat Keputusan Camat Jetis Nomor Tahun 2024 tentang Tim Penyusunan Renja Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembangunan di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Jetis sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 Kecamatan Jetis ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jetis. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Kecamatan JETIS dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n -

1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai:

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jetis permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Review Terhadap RKPD

Berisikan Uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain:

- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan
- b. Lokasi program/kegiatan
- c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- d. Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Jetis pada tahun 2024 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2024 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Realisasi belanja pada Kecamatan Jetis Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN		
			(Rp)	(%)	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.342.777.000	2.176.642.505	92,91	166.134.495
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.900.000	10.577.000	88,88	1.323.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	6.897.000	91,96	603.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.400.000	3.680.000	83,64	720.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.981.665.000	1.837.780.535	92,74	143.884.465
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.981.665.000	1.837.780.535	92,74	143.884.465
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.500.000	126.107.800	94,46	7.392.200
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.046.500	93,64	954.500

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	9.100.000	91,00	900.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	29.907.500	99,69	92.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	11.999.800	100	200
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000	2.244.000	89,76	256.000
	Penyediaan Bahan/Material	24.000.000	21.310.000	88,79	2.690.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	37.500.000	93,75	2.500.000
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	134.424.000	123.506.632	91,88	10.917.368
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000	48.071.656	89,02	5.928.344
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.424.000	123.506.632	91,88	10.917.368
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.288.000	78.670.538	96,78	2.617.462
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.000.000	40.063.538	95,39	1.936.362
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.288.000	31.162.000	99,60	126.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000	7.445.000	93,06	555.000
2.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.759.000	9.645.000	98,83	114.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	9.759.000	9.645.000	98,83	114.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9.759.000	9.645.000	98,83	114.000
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	254.419.200	250.578.000	98,49	3.841.200
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	254.419.200	250.587.000	98,49	3.841.200
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	35.000.000	34.999.800	100	200
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	40.000.000	39.999.900	100	100
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	53.519.000	53.503.200	99,97	15.800
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	125.900.200	122.075.100	96,96	3.825.100
	JUMLAH	2.606.955.200	2.436.865.505	93,48	170.089.695

Berdasarkan table diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja kecamatan Jetis secara umum terlaksana dengan baik yaitu 93,48%, Pagu Anggaran sebesar Rp. **2.606.955.200,-** terealisasi sebesar **Rp. 2.436.865.505,-** sisa anggaran **Rp. 170.089.695,-** .

Sisa anggaran yang tidak terserap dengan maksimal disebabkan beberapa hal, diantaranya:

- d. Anggaran **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** karena adanya staff yang pensiun
- e. Anggaran **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** karena menyesuaikan penggunaan Sumber Daya Air dan Listrik di Kantor Kecamatan Jetis;
- f. Beberapa realisasi pada belanja dengan menggunakan e-katalog yang menyesuaikan harga nego dengan penyedia

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

TABEL 2.3 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan JETIS

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Pogram (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,48 (BB)	80 (BB)	81 (A)	81.05 (A)	100.08%	81.5 (A)	81,5 (A)	100%
		Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	100%	2 Inovasi	2 Inovasi	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
		Persentase Indikator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target								
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	21 Laporan	21 Laporan	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	94%	91.81%	92 %	91,63%	99,60%	92%	92%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	100%	13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	85	70.85	82,0	84,5	103%	84,7	84,7	103%
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang	14 Orang	14 Orang	100%	12 Orang	12 Orang	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	92%	98%	92%	92%	100%	92%	92%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Dokumen	-	12	12	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

	Perundang-Undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan			Dokumen	Dokumen				
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7.01.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dapat terpenuhi	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	98%	98.7%	98.7%	98.7%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	98%	98.7%	98.7%	98.7%	100%	85%	85%	100%
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	10 Unit	24 Unit	24 Unit	100%	24 Unit	24 Unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah Ditindaklanjuti	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	6 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan koordinasi	23 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
7.01.06.2.01.09	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka	5 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

	Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indikator Kepala Daerah pada Misi 1 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan JETIS

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.5 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.5 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan JETIS
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IKM Kecamatan	-	-	88,6	92	92,25	92,50	92	-	92,25	92,50	-

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan JETIS diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Jetis

- Faktor Kekuatan Organisasi

- Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
- Ketersediaan anggaran yang cukup untuk operasional dan program kerja;
- Ketersediaan dan kelengkapan infrastruktur fisik dan alat kerja yang memadai;
- Kemampuan mengadopsi dan menggunakan teknologi canggih serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- Memiliki struktur organisasi yang efektif dan system kerja yang tertata baik untuk mendukung pencapaian tujuan;

- Faktor Kelemahan Organisasi

- Jumlah pegawai yang kurang dapat menyebabkan beban kerja berlebihan dan penurunan kualitas pelayanan :
- Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
- Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan JETIS namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi
 1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata;
 2. Tingginya peluang pasar;
 3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
 4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan.
- Faktor Tantangan Organisasi
 1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana;
 2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan;
 3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat;
 4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan;
 5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
 6. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
 7. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang;
 8. Pelayanan yang Kurang Optimal di Masa Pandemi Covid-19;
 9. Peningkatan Kinerja melalui Inovasi dan Penerapan E-Office.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan JETIS yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan JETIS untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4 Review Terhadap RKPD

Berdasarkan RKPD Tahun 2026 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah

Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.6 (T-C 31) berikut :

Tabel 3.1 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan JETIS

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. JETIS	1. Nilai SAKIP 2. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	81,5 2 inovasi	2.411.507.800	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. JETIS	1. Nilai SAKIP 2. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	81,5 2 inovasi	2.451.186.250	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. JETIS	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	100%	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. JETIS	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	100%	15.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. JETIS	Jumlah dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. JETIS	Jumlah dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	7.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. JETIS	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	23 laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. JETIS	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	23 laporan	7.500.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. JETIS	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	92%	2.115.038.250	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	92%	2.115.038.250	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. JETIS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13 orang/bulan	2.115.038.250	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. JETIS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13 orang/bulan	2.115.038.250	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. JETIS	IP ASN Perangkat Daerah	-	0.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. JETIS	IP ASN Perangkat Daerah	-	0.00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. JETIS	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	-	0,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. JETIS	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	-	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. JETIS	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	92%	92.815.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. JETIS	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	92%	119.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. JETIS	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	5.775.550	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. JETIS	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	6.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. JETIS	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	22.418400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. JETIS	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	35.000.000	
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. JETIS	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	20.000.000	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. JETIS	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	25.000.000	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. JETIS	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	6.284.650	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. JETIS	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	7.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. JETIS	Jumlah paket bahan material yang disediakan	1 paket	11.091.200	Penyediaan Bahan/Material	Kec. JETIS	Jumlah paket bahan material yang disediakan	1 paket	12.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. JETIS	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	2.245.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. JETIS	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	4.000.0000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. JETIS	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	25.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. JETIS	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. JETIS	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	136.340.100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. JETIS	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	139.824.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. JETIS	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	41.516.100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. JETIS	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	45.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. JETIS	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum	12 laporan	94.824.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. JETIS	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum	12 laporan	94.824.000	

			kantor yang disediakan					kantor yang disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. JETIS	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	57.314.450	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. JETIS	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	63.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. JETIS	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dapat terbayarkan pajaknya	2 unit	31.651.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. JETIS	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dapat terbayarkan pajaknya	2 unit	35.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. JETIS	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	16.932.750	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. JETIS	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	18.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. JETIS	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 unit	8.730.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. JETIS	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 unit	10.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan	Kec. JETIS	Persentase layanan yang diselenggarakan	100%	25.044.900	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan	Kec. JETIS	Persentase layanan yang diselenggarakan	100%	37.000.000	

	Pelayanan Publik		sesuai standar			Pelayanan Publik		sesuai standar			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. JETIS	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%	25.044.900	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. JETIS	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%	37.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. JETIS	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 laporan	25.044.900	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. JETIS	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	5 laporan	37.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. JETIS	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%	224.421.300	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. JETIS	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%	261.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. JETIS	Jumlah Laporan Koordinasi	27 Laporan	224.421.300	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. JETIS	Jumlah Laporan Koordinasi	32 Laporan	261.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. JETIS	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 dokumen	35.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. JETIS	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	50.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Kec. JETIS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan	8 dokumen	40.198.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Kec. JETIS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan	9 dokumen	46.000.000	

	Daerah dengan Pembangunan Desa		Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Daerah dengan Pembangunan Desa		Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. JETIS	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	35.407.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. JETIS	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 dokumen	45.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. JETIS	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 dokumen	113.816.300	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. JETIS	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 dokumen	120.000.000	
JUMLAH					2.660,974.000	JUMLAH					2.749.186.250

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 1. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan JETIS melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan JETIS secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.7 (T-C 32) berikut :

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

Nama OPD: Kecamatan JETIS

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Jetis	-	1 ekor	Hibah Sapi Qurban

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan JETIS ditujukan untuk Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2025 – 2029, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Kecamatan JETIS menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu : Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, yaitu: “Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan JETIS, dalam hal ini Kecamatan JETIS Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 – 2029. Sasaran merupakan bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan JETIS menetapkan sasaran strategi ”Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan.

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan JETIS Kabupaten Mojokerto pada 2025 – 2029 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.

Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	92	92,25	92,50	92,75	93	93,25

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan JETIS Tahun 2026 mengacu pada Tujuan Kecamatan JETIS yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan JETIS untuk 5 tahun mendatang yaitu Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah yaitu antara lain :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif:
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6. Pemerintahan Bahan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- C. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Tabel 3.2 (T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan JETIS**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4		5		8	9	10
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	Kec.Jetis	81,5	2.411.507.800	DBH			
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Kec. Jetis	2 Inovasi		DBH			
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	Kec.Jetis	100%		DBH			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Jetis	6 dokumen		DBH			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Jetis	23 laporan		DBH			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kec. Jetis	92,5%		DAU			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Jetis	13 orang/bulan		DAU			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Kec. Jetis	-		DBH			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec.Jetis	-		DBH			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Jetis	-		DBH			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Kec.Jetis	86%		DBH			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	Kec. Jetis	1 paket		DBH			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	Kec.Jetis	6 paket		DBH			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)	Kec. Jetis	1 paket		DBH			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	Kec.Jetis	1 paket		DBH			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)	Kec. Jetis	12 dokumen		DBH			
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)	Kec.Jetis	1 paket		DBH			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Kec. Jetis	12 laporan		DBH			

		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	Kec.Jetis	100%		DBH			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Jetis	12 laporan		DBH			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Jetis	12 laporan		DBH			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kec. Jetis	86%		DBH			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec.Jetis	2 unit		DBH			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Jetis	2 unit		DBH			
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Jetis	25 unit		DBH			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec. Jetis	100%		DBH			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Kec.Jetis	100%		DBH			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Jetis	6 laporan		DBH			
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	Kec.Jetis	100%		DBH			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi	Kec. Jetis	23 Laporan		DBH			
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Jetis	8 dokumen		DBH			
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Jetis	5 dokumen		DBH			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Jetis	5 dokumen		DBH			
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Jetis	5 dokumen		DBH			
	TOTAL								

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan JETIS Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2026
KECAMATAN JETIS
KABUPATEN MOJOKERTO

Kode SKPD														
NAMA SKPD		KECAMATAN JETIS												
NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp.)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME				SKPD Terkait	PAGU (Rp)	KL	Rp.	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			Nilai SAKIP									
					Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan									
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi									
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			IP ASN Perangkat Daerah									
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan									
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase penyediaan Administrasi Umum perangkat Daerah sesuai kebutuhan									
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi									

					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)										
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)										
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)										
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)										
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan(Dokumen)										
		Penyediaan Bahan / Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)										
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)										
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan										
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan										
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik										
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya										
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara										
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor			Jumlah Gedung Kantor										

		dan Bangunan Lainnya			dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan									
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti									
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Jumlah laporan koordinasi									
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa									
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
		TOTAL												

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Kecamatan JETIS Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan JETIS Tahun 2026 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan JETIS, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan JETIS, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan JETIS Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan rancangan akhir Renja Kecamatan JETIS Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan JETIS Tahun 2026 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Rencana Kerja Kecamatan JETIS Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.